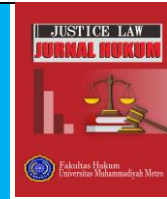




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2021)
ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



KEBIJAKAN DESA DALAM MENGGUNAKAN DIGITALISASI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN

Nitaria angkasa, Guna Yanti K.S. Siregar,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro

Abstrak

Akibat Pandemi Covid 19 ini, berbagai macam kalangan dipaksa untuk melek teknologi dalam penggunaan digitalisasi, agar semua dapat berjalan, meskipun harus di masa pandemic 19 ini. Teknologi dunia digitalisasi ini bukan hanya digunakan oleh para remaja, namun saat ini digitalisasi digunakan oleh seluruh masyarakat bukan hanya di negara luar namun juga di Indonesia. Beberapa pekerjaan juga tidak lepas dari digitalisasi bukan hanya pengusaha, swasta namun juga pemerintahan juga dipaksa untuk menggunakan digitalisasi. Pemerintahan di negara Indonesia telah mengeluarkan E government untuk dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, E government dapat dikatakan sebagai aplikasi guna mempermudah pekerjaan pemerintah untuk melayani masyarakat. Metode penelaahan dari berita, dan menganalisis gejala, maka Pembahasan pada penelitian ini adalah Perubahan model tatanan pemerintahan desa perlu dipersiapkan dengan matang, dari segi kebijakan serta dari teknologi yang luar biasa, dengan memberikan informasi soal kebijakan dan teknologi yang dikeluarkan dari tingkat RT, serta tingkat RW dan aparat pemerintahan desa yang lain, agar tidak ada diskomunikasi dalam pelaksanaannya, dan konsepnya akan berjalan dengan baik, sehingga mempermudah masyarakat yang ada di desa dalam mendapatkan hak-haknya dan begitu juga dengan pemerintahan desanya yang dapat berjalan dengan baik walaupun tetap dari rumah. Dan Ada regulasi pemerintah yang dikeluarkan apada masa pandemic ini adalah Keputusan Kementrian Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Covid-19, dengan adanya pencegahan tersebut pemerintah dan kantor-kantor harus menaati itu semua untuk birokrasi juga disiapkan dalam menghadapi era pandemi Covid-19 ini. Bersama Kemenpan RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Tatanan Normal Baru (new normal). Hal baru disesuaikan dengan budaya dalam pemerintahan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Desa, Digitalisasi, Pelayanan

PENDAHULUAN

Masa pandemi yang sudah melanda dari beberapa negara, termasuk juga negara Indonesia, sehingga sebagai suatu negara memiliki tanggung jawab yang sangat sulit dengan harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan menjaga kondusifnya hubungan yang disertai dengan menjaga jarak dalam Pandemi Covid-19.

Akibat Pandemi Covid 19 ini, berbagai macam kalangan dipaksa untuk meleak teknologi dalam penggunaan digitalisasi, agar semua dapat berjalan, meskipun harus di masa pandemic 19 ini.

Teknologi dunia digitalisasi ini bukan hanya digunakan oleh para remaja, namun saat ini digitalisasi digunakan oleh seluruh masyarakat bukan hanya di negara luar namun juga di Indonesia. Beberapa pekerjaan juga tidak lepas dari digitalisasi bukan hanya pengusaha, swasta namun juga pemerintahan juga dipaksa untuk menggunakan digitalisasi.

Pemerintahan di negara Indonesia telah mengeluarkan E government untuk dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, E government dapat dikatakan sebagai aplikasi guna mempermudah pekerjaan pemerintah untuk melayani masyarakat.

Mengingat masyarakat Indonesia sudah hampir semuanya menggunakan media digitalisasi, maka dengan demikian e government adalah solusi pelayanan pemerintahan dalam memfasilitasi pelayanan masyarakat guna penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat.

System pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan menggunakan system desentralisasi, maka pemerintahan di Indonesia terbagi dalam kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, maka dalam kebijakan e government berarti bukan hanya pemerintahan pusat dan pemerintahan desa yang berupaya untuk menggunakan e government untuk meningkatkan potensi kerja birokrasi pemerintahan menuju kepada E government.

Proses identifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi juga harus berfokus kepada penggunaan sarana dan prasarana IT yang digunakan sebagai syarat utama terhadap layanan berbasis IT. Sarana dan prasarana ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi karena semakin canggih Teknologi Informasi yang dimiliki oleh desa akan semakin bagus juga pelayanannya.¹

Infrastruktur digital plus akselerasi transformasi digital di pemerintahan dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui pengetahuan ekonomi turut menjadi fokus belanja dari pemerintah. Pembangunan infrastruktur digital seperti internet memang dibutuhkan mengingat masih ada ketimpangan akses internet di Indonesia. Arah dan kesadaran dari Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya percepatan transformasi digital serta fokus belanja dari RAPBN 2021 menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalan yang tepat. Perbaikan kapabilitas R&D, berinovasi pada proses produksi dan produksi barang baru serta kualitas talenta Indonesia wajib dilakukan. Faktor lain seperti dukungan regulasi serta pembiayaan transformasi digital tentu tidak boleh dilupakan. Saatnya menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum².

Dari laporan Microsoft, sebanyak 90% pebisnis Indonesia menyatakan perlu melakukan transformasi digital untuk

¹ Ronal Watrionthos, Ade Parlaungan Nasution, and Muhammad Syaifullah, 'MODEL E-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17.1 (2019), 53-60 <<https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.2239>>.

² Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin, "Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia Dalam Studi " The Microsoft Asia Digital Transformation: Enabling The Intelligent Presiden Joko Widodo Pada Rapat Terbatas Mengenai Perencanaan Tr", *Kybernan: Jurnal Stdui Kepemerintahan*, 4.2 (2021), 226-39.

mendorong pertumbuhan perusahaan (Katadata, 2017). Kabar buruknya, hanya 27% pebisnis yang sudah memiliki strategi secara menyeluruh, sedangkan 51% masih merencanakan dan 22% belum memiliki strategi tersebut. Transformasi digital di tingkat perusahaan tidak dapat terwujud sendirian. Dukungan dari pemerintah tentu dibutuhkan agar transformasi digital mampu terwujud di Indonesia. Menyadari besarnya manfaat dari transformasi digital, Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Perencanaan Transformasi Digital, Senin 3 Agustus 2020 menyampaikan lima arahan yang terdiri dari perluasan³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (*literature review* atau *literature research*) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu.⁴ Kajian ini dikaji dengan menggunakan literatur kajian Pustaka dan melihat dari berita-berita terkini dalam hubungannya pemerintahan dan pandemic saat ini, kemudian menganalisis lalu menemukan gagasan berdasarkan kebijakan peraturan dan teori guna menjawab permasalahan. dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

³ Firdaus, Tursina, and Roziqin.

⁴ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya digitalisasi dalam pelayanan pemerintahan desa

Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang di dalamnya terdapat organ-organ pemerintahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh m. hadjon bahwa pemerintah secara eksekutif adalah memiliki kewenangan dalam rangka pemerintahan dengan melayani masyarakat.⁵ Pandemi Covid-19 telah membeberikan pengalaman bagi masyarakat dan pemerintah untuk dapat menjalankan fungsi masing-masing, terutama pemerintah yaitu harus mencari jalan keluar untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik serta dapat tetap melayani masyarakat sesuai haknya masing-masing ditengah pandemi saat ini.

Berbicara pemerintah di Indonesia bukan hanya pemerintah pusat saja, namun juga ada pemerintah daerah, dan ada juga pemerintahan desa. dimana negara kesatuan sistem pemerintahannya menggunakan desentralisasi dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁶

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melaksanakan pelayanan dengan menggunakan sistem digitalisasi, sebagaimana urusan-urusan pemerintahannya, saat ini tantangan juga harus dilaukan oleh pemerintahan desa, dalam melaksanakan pelayanan desa agar lebih maksimal dilakukan dengan oleh pemerintahan desa.

Permasalahan pandemic yang sampai saat ini masih melanda negara indonesia ini, menjadi harus ada perubahan dari beberapa instansi, dan pemerintahan desa sebagai suatu pemerintahan desa yang juga melayani masyarakat desa, harus dapa merubah birokrasinya, dimana birokrasi desa yang dulu melaksanakan pelayanan

⁵ Philipus M. Hadjon, *No Tentang Wewenang* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998). Hlm. 34

⁶ Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 23

dengan tidak menggunakan digitalisasi saat ini juga harus dipaksa dengan digitalisasi.

Pelaksanaan pekerjaan yang dahulu terbiasa datang ke kantor, dan jarang dikerjakan dari rumah saat ini dalam pelaksanaannya harus adapat dikerjakan dari rumah agar pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik.

Birokrasi desa adalah suatu alat atau mesin pemerintahan dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan sebagai suatu organisasi⁷.

Ada pekerjaan pelayanan di desa yaitu membuat surat keterangan, baik surat keterangan domisili, surat keterangan waris, dan surat keterangan miskin dan lain-lain menjadi hak masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah desa.

Perubahan birokrasi yang harus dilaksanakan adalah membiasakan birokrasi menggunakan teknologi digitalisasi dengan tetap dapat melayani masyarakat yaitu sebagaimana yang sudah di jabarkan dalam aturan dari pemerintah pusat yaitu adanya elektronik yang dapat membantu pemerintah desa dalam mempermudah masyarakat mengeluarkan surat keterangan.

Adanya aplikasi untuk semua masyarakat dengan menertibkan email masing-masing masyarakat agar, masyarakat yang membutuhkan surat keterangan tersebut dapat dilaksanakan dari rumah.

Pengecekan dan penertiban tersebut dapat juga dilakukan terlebih dahulu oleh kepala desa dengan menggunakan email yang bertanggungjawab oleh masyarakat tersebut.

Konsep yang akan dilaksanakan tersebut tentu saja perlu adanya Kerjasama antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dengan pihak ahli teknologi atau komputer dalam pelaksanaannya.

Perubahan model tatanan pemerintahan desa perlu dipersiapkan dengan matang, dari segi kebijakan serta dari teknologi yang luar biasa, dengan memberikan informasi soal kebijakan dan teknologi yang dikeluarkan dari tingkat RT, serta tingkat RW dan aparat pemerintahan desa yang lain, agar tidak ada diskomunikasi dalam pelaksanaannya, dan konsepnya akan berjalan dengan baik, sehingga mempermudah masyarakat yang ada di desa dalam mendapatkan hak-hanya dan begitu juga dengan pemerintahan desanya yang dapat berjalan dengan baik walaupun tetap dari rumah.

Tugas pemerintah ialah memberikan layanan yang baik bagi masyarakat, meskipun dalam masa pandemi seperti saat ini. Teknologi dengan digitalisasi dalam pemerintahan memang jalan keluar yang tepat untuk saat ini dalam melaksanakan kinerja dan peningkatan kinerja pegawai serta birokrasi baik di tingkat pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kondisi kita saat ini memerlukan tatanan dengan perubahan yang baru dengan tatanan dan model kinerja dengan penerapan distansing antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Perubahan di Indonesia saat ini sangat cepat dan perlu adanya perubahan dalam bentuk kinerja dalam masyarakat dengan berbangsa dan bernegara, dengan berlandaskan bahwa kepentingan rakyat diletakkan pada urutan yang pertama, maka diberikan ruang kepada pemerintah sebagai pengendali birokrasi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Kinerja pemerintah dengan konsep dan pelaksanaan yang harus diubah dengan dalam kurun waktu yang cepat, memang akan menimbulkan permasalahan dalam ketidakpastian. Perencanaan yang tepatlah yang dilaksanakan pemerintahan dalam melaksanakan pelaksanaan dalam masyarakat. Komunikasi yang selalu intens antara Lembaga negara dan Lembaga pemerintahan diperlukan saat ini dalam memecahkan permasalahan pelayanan masyarakat serta dalam membentuk konsep

⁷ Bhenyamin Hoessein, 'Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah', *Bisnis Dan Birokrasi*, 1 (2002). Hlm. 22

yang tepat dalam pelayanan dalam masyarakat.

Pemerintah juga harus emndengarkansaran dari masyarakat serta keluh kesah dari masyarakat, sehingga lingkaran dlam pelayanan dapat dijalankan dengan baik dan terarah yaitu pemerintah, birokrasi baik dari atasan maupun bawahan baik pada tingkatan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta RT, RW dan Lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang ada dalam lingkaran pelayanan pada masyarakat.

Kemajuan Teknologi sangat diperlukan saat ini, dengan efisiensi yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pekerjaan saat ini, juga kecepatan penyampaian informasi , dalam menjangkau informasi dan juga keterjangkauan dalam melaksanakan transsparansi dan tidak terkecuali dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintahan, karena bukan berarti saat ini dalam hal permasalahan pandemic, semua orang tidak ada beban sehingga tidak bekerja, namun disini konnsep yang harus kita tekankan adalah pelaksanaan pekerjaan yang tetap harus diterapkan walau hanya dalam masa pandemi.

Pemerintah Indonesia saat ini dengan pemerintahan yang otonomi perlu melaksanakan pemerintahan yang baik atau juga dapat disebut sebagai good governance, dengan demikian ada Namanya E-Government adalah suatu bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan pada masyarakat dengan menggunakan metode elektronik dengan menerapkan teknologi dalam informasi, dengan diharapkan melalui yang Namanya E government dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah sudah mempersiapkan dlaam bentuk kebijakan sehingga dlama pemerintahan baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dapat ikut serta dan secara merata meningkatkan kualiatas pelayanan dengannan menggunakan e governance dengan mencari metode dengan baik pada

masing-masing birokrasi pemerintahan sehingga masyarakat tetap dapat mendapatkan pelayanan dan haknya masing-masing pada wilayah dan pemerintah dimasing-masing wilayahnya.

Pencapaian konsep dalam pemerintahan di atas memang harus dipersiapkan dalam komputerisasi baik itu kebijakan, sumber daya manusia, dan teknologi dalam masing-masing birokrasi, sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi dalam masing-masing birokrasi tersebut, begitupun dalam pemerintahan desa yang saat ini masih kita bahas.

Peningkatan pekerjaan dalam pandemic covid 19 ini sangat memerlukan peran digital. Maraknya penyebaran pandemi 19 ini yang hampir di seluruh wilayah Indonesia diadakannya pembatasan sosial berskala besar, sehingga membatasi aktivitas masyarakat yang mempengaruhi pembatasan perkantoran, sekolah serta perjalanan keluar kota. Pembatasan tersebut menyebabkan perubahan metode dan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat.

keterbatasan tersebut, kebiasaan masyarakat telah berubah dari aktivitas fisik menjadi kebiasaan berbasis teknologi baru, berfungsi sebagai media komunikasi, interaksi, kegiatan belajar-mengajar, dan bekerja di rumah. Pandemi Covid-19 di hampir semua negara di dunia sebenarnya telah menimbulkan banyak krisis dalam kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, masyarakat dan ekonomi. Ini termasuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari. Misalnya, berbagai jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan di kantor telah mengubah mode bekerja di rumah. Misalnya, berbagai jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan di kantor telah berubah mode menjadi bekerja di rumah. Pada saat yang sama, bagaimana mendapatkan "kepercayaan yang cukup" dalam hasil audit untuk pekerjaan pengawasan yang perlu langsung ke tempat kejadian. Di masa pandemi Covid-19, pembatasan pergerakan dan berkumpulnya orang di satu lokasi tentunya menjadi kendala tersendiri bagi kinerja tugas

auditor. Untuk tetap menjalankan tugas pengawasan di masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi industri audit, dan belum jelas kapan akan berakhir.⁸

2. Dasar Hukum Kebijakan Desa dalam pelaksanaan Pelayanan dengan menggunakan digitalisasi

Desa berdasarkan UU 6/2014, memiliki kewenangannya dalam mengatur urusan pemerintahan desa guna berjalannya pemerintahan desa dengan baik dan benar, dalam perkembangannya dapat kita ketahui kewenangan yang menjadi pemerintahan desa⁹

Ada regulasi pemerintah yang dikeluarkan apada masa pandemic ini adalah Keputusan Kementerian Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Covid-19, dengan adanya pencegahan tersebut pemerintah dan kantor-kantor harus menaati itu semua untuk birokrasi juga disiapkan dalam menghadapi era pandemi Covid-19 ini. Bersama Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Tatanan Normal Baru (new normal). Hal baru disesuaikan dengan budaya dalam pemerintahan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Kontrol Elektronik, Instruksi Presiden No. 2003-3 menetapkan Strategi Pengembangan e-Government untuk mendukung pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas publik, dan untuk mempromosikan proses demokrasi. Hal ini juga dijelaskan oleh hukum bilangan besar. Keterbukaan Informasi Publik Untuk Transparansi dan

Akuntabilitas 1 2008. Dibandingkan dengan Program Prioritas e-government merupakan salah satu prioritas Indonesia dalam pengembangan broadband di bawah sistem Internet yang diatur dalam Peraturan Umum. Program Pita Lebar Indonesia 201 2019 96 Tahun 2013 87. Pasal 7 menetapkan prioritas pengembangan pita lebar di Indonesia dalam lima sektor. e-Government, eHealth, E Education, eLogistics, eProcurement, dan lainnya.

Berdasarkan kebijakan pemerintah di atas, maka penting sekali E government dilaksanakan di berbagai hirarki pemerintahan termasuk pemerintahan desa, yang menjadi pembahasan dalam kajian kita disini. Dari ungkapan di atas, maka sebenarnya pemerintah desa juga dapat mengkreasikan aplikasi E government tersebut dengan melihat kemampuan dan kebiasaan dalam pemerintahan desa tersebut, dengan tujuan meskipun bekerja dengan pembatasan sosoal ini, pekerjaan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Metode dalam melaksnaakan E government, harus disertai dengan sarana dan prasarana seperti computer, laptop, printer dan alat lainnya serta fasilitas lainnya dan sumber daya manusia dalam bidang computer sehingga sarana prasarana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

E government sebaiknya dapat dilaksanakan juga pada tingkat pemerintahan desa, dengan demikian permasalahan tentang pelayanan public tidak mengalami kendala dalam masa pandemic ini.

Ada beberapa tantangan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan digitalisasi E government pada tingkat pemerintahan desa adalah kebiasaan dan budaya di negara Indonesia yang sebelum pandemi masih dikerjakan secara manual, dan pada masa pandemi pekerjaan yang dilaksanakan secara manual tersebut dipaksakan untuk berubah kepada konsep digitalisasi yang mana pada kebijakan pemerintah dalam pelayanan disebut

⁸ Firdaus, Tursina, and Roziqin.

⁹ HAW.Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

dengan E government, kebiasaan yang tadinya sudah menjadi rutinitas dan sudah menguasai tanpa menggunakan digitalisasi, maka akan menjadi lama untuk membuat konsepnya dan perencanaannya pun dirubah dahulu serta harus menggunakan persiapan yang matang dalam perencanaannya serta kebijakannya agar pelayanan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Tantangan dalam konsep E government juga adanya kolaborasi yang era tantara instansi yang satu dengan yang lainnya, namun hal demikian memang harus membutuhkan waktu untuk menentukan persiapan seperti mendata lagi tentang kewenangan yang satu dengan kewenangan yang lain sehingga jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan, maka memang diperlukan koordinasi yang baik antara instansi yang satu dengan instansi yang lainnya.

Digitalisasi harus juga menggunakan yang dalam bentuk ahlinya yaitu orang yang memang ahli dibidang computer dalam melaksanakan digitalisasi tersebut, maka dengan demikian pelayanan diperlukan kebijakan serta orang yang dalam bidang komputer agar dapat dilaksanakannya pekerjaan digitalisasi dalam e government pada tingkat pemerintahan desa ini, yang mana tujuannya adalah demi organisasi ini.

SIMPULAN

1. **Metode penelaahan dari berita, dan menganalisi gejala, maka Pembahasan pada penelitian ini adalah** Perubahan model tatanan pemerintahan desa perlu dipersiapkan dengan matang, dari segi kebijakan serta dari teknologi yang luar biasa, dengan memberikan informasi soal kebijakan dan teknologi yang dikeluarkan dari tingkat RT, serta tingkat RW dan aparat pemerintahan desa yang lain, agar tidak ada diskomunikasi dalam pelaksanaannya, dan konsepnya akan berjalan dengan baik, sehingga mempermudah masyarakat yang ada di desa dalam mendapatkan hak-hanya dan begitu juga dengan pemerintahan

desanya yang dapat berjalan dengan baik walaupun tetap dari rumah.

2. **Ada regulasi pemerintah yang dikeluarkan apada masa pandemic ini adalah Keputusan** Kementerian Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Covid-19, dengan adanya pencegahan tersebut pemerintah dan kantor-kantor harus menaati itu semua untuk birokrasi juga disiapkan dalam menghadapi era pandemi Covid-19 ini. Bersama Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Tatanan Normal Baru (new normal). Hal baru disesuaikan dengan budaya dalam pemerintahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Inas Tasya, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin, "Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia Dalam Studi " The Microsoft Asia Digital Transformation: Enabling The Intelligent Presiden Joko Widodo Pada Rapat Terbatas Mengenai Perencanaan Tr', *Kybernan: Jurnal Stdui Kepemerintahan*, 4.2 (2021), 226-39
- Hadjon, Philipus M., *No Tentang Wewenang* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998)
- HAW.Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Hoessein, Bhenyamin, 'Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah', *Bisnis Dan Birokrasi*, 1 (2002)

Watrianthos, Ronal, Ade Parlaungan Nasution,
and Muhammad Syaifullah, 'MODEL E-
GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA',
Majalah Ilmiah UNIKOM, 17.1 (2019), 53-
60
<<https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.2239>>

Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2012)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Desa